



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

Analysis of Factors Affecting Audit Delay in South Sumatra Provincial Government

1)* **Dhea Tasyania Ramadhani**, 2) **Sulaiman**, 3) **Nurhasanah**

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

*Email: 1)*dheatasvaniamadhani28@gmail.com, 2) rahmat1249@gmail.com,

3)nurhasanahrizkyramadhan@gmail.com

*Correspondence: Dhea Tasyania Ramadhani

DOI:

10.36418/comserva.v2i07.442

Histori Artikel

Diajukan : 01-11-2022

Diterima : 18-11-2022

Diterbitkan : 28-11-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage terhadap audit delay di pemerintahan provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan daftar kepala daerah yang dikeluarkan oleh Permendagri. Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage secara simultan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Secara parsial tingkat kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap audit delay sedangkan ukuran pemerintah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay pemerintahan provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Ukuran Pemerintah; Tingkat Kemandirian Daerah; Temuan Audit; Terpilihnya Kembali Kepala Daerah; Leverage; Audit Delay

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of government size, level of regional independence, audit findings, re-election of regional heads and leverage on audit delay in the South Sumatra provincial government. The data collection technique used in this study is to use secondary data in the form of an Examination Result Report (LHP) and a list of regional heads issued by the Minister of Home Affairs. The data of this study were analyzed using multiple linear regression analysis using the IBM SPSS Version 25 software. The results of this study indicate that the size of the government, the level of regional independence, audit findings, re-election of regional heads and leverage simultaneously have no effect on audit delay. Partially the level of regional independence has a significant effect on audit delay while the size of the government, audit findings, re-election of regional heads and leverage have no effect on audit delay of the South Sumatra provincial government.

Keywords: Government Size; Level of Regional Independence; Audit Findings; Re-election of Regional Heads; Leverage; Audit Delay

PENDAHULUAN

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa Laporan Keuangan yang dibuat untuk menilai atau melihat kinerja keuangan suatu instansi (Pramono, 2014). Diperlukan sistem pelaporan yang baik dan berguna bagi masyarakat dan pemakai laporan keuangan lainnya (Nurillah & Muid, 2014). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 (PP No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna (Sitorus et al., 2015).

Pada Sektor Pemerintahan, Laporan Keuangan dikenal dengan nama Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) (Indonesia, 2014). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Septariani, 2019).

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan adalah hal yang wajib dilaksanakan (Maharani, 2013). Hal ini berkaitan dengan Penyampaian Laporan Keuangan memiliki batas waktu seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” (Sandag, 2015).

Audit delay merupakan keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD (Wibowo & Purwaningsih, 2019). BPK harus menjalankan tugasnya untuk menyampaikan LHP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan agar tidak terjadi *audit delay* (Verawaty, 2021). Audit delay yang melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan (Wiryakriyana & Widhiyani, 2017).

Tabel 1. Daftar Kabupaten/Kota yang mengalami *Audit Delay* di Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Kabupaten	Kota
1	2018	-	-
2	2019	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir	Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang
3	2020	-	-

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018-2020.

Berdasarkan tabel 1. yang diambil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa data Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sedang mengalami *Audit*.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metodologi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada ukuran kuantitas atau jumlah yang mana dapat diaplikasikan pada fenomena yang diobservasi (Saragih et al., 2021).

Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya audit delay pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, peneliti akan menguji beberapa variabel, seperti Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah dan Leverage.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *Probability Sampling* dengan pendekatan *Cluster Sampling* (Area Sampling). *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Retnawati, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif berfungsi sebagai penganalisis data dengan menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan tanpa penggeneralisasian. Penelitian ini menjabarkan rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dari masing-masing variabel sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit delay*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, opini audit, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage*.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah	36	18648516928 19,07	60752037684 51,60	31555695029 72,1714	1089869831 653,56400
Tingkat Kemandirian Daerah	36	,031602	,114306	,07146804	,025534674
Temuan Audit	36	6,00	23,00	14,0278	4,24591
Terpilihnya Kembali Kepala Daerah	36	0	1	,14	,351
Leverage	36	,001193	,052501	,01316257	,013504616
Audit Delay	36	77	181	140,81	28,053
Valid N (listwise)	36				

Sumber: *Ouput SPSS, 2022*

Berdasarkan tabel 2. menjelaskan bahwa *audit delay* memiliki nilai minimum 77 hari yaitu di daerah kabupaten Ogan Komering Ulu dan nilai maximum sebesar 181 hari yaitu di kota Lubuk Linggau dengan nilai mean 140,81 hari dan standar deviation 28,053 hari.

Variabel ukuran pemerintah dalam penelitian ini merupakan seberapa banyak total aset yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam penelitian ini menggunakan Logaritma Natural seluruh jumlah asset

yang dimiliki. Berdasarkan tabel 2. menunjukkan bahwa total aset minimum dimiliki oleh daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan total 1.864.851.692.819,07 dan total aset maximum dimiliki oleh kabupaten Muara Enim dengan total aset sebesar 6.075.203.768.451,60, nilai mean sebesar 3155569502972,1714 dan nilai standar deviation sebesar 1089869831653,56400.

Variabel tingkat kemandirian daerah pada penelitian ini dilihat dari rasio kemandirian masing-masing daerah. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa rasio kemandirian minimum ada di daerah kabupaten Empat Lawang dengan nilai rasio ,031602 dan rasio kemandirian maximum ada di Kota Lubuk Linggau dengan nilai ,114306, nilai mean ,07146804 dan standar deviation sebesar ,025534674.

Variabel temuan audit merupakan permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan yang diungkapkan dalam LHP setiap daerah maupun kota. Pada penelitian ini temuan audit dilihat dari banyaknya jumlah temuan yang ditemukan oleh auditor. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa temuan audit minimum ada di daerah kabupaten Muara Enim dan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan jumlah temuan sebanyak 6 dan nilai maximum temuan audit terdapat di Kota Palembang dengan total temuan sebanyak 23, nilai mean 14,0278 dan standar deviation sebesar 4,24591.

Variabel kepala daerah yang terpilih kembali lebih mengetahui mengenai langkah-langkah persiapan dalam memberikan fasilitas prosedur audit dan standar prosedur akuntansi. Kepala daerah yang terpilih kembali lebih banyak memiliki pengetahuan dari pada kepala daerah yang baru terpilih. Pada penelitian ini terpilihnya kembali kepala daerah dilihat menggunakan *dummy*, jika kepala daerah tersebut telah menjabat sebanyak 2 periode maka diberi angka (1), sebaliknya jika kepala daerah tersebut baru menjabat menjadi kepala daerah maka diberi angka (0).

Berdasarkan tabel 2 banyak kepala daerah yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kepala daerah yang telah menjabat 2 periode terdapat pada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir, kota Lubuk Linggau, kota Prabumulih dan kota Palembang dengan nilai mean ,14 dan standar deviation sebesar ,351.

Variabel *leverage* merupakan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Pada penelitian ini dilihat dari jumlah kewajiban yang dimiliki suatu daerah. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa kabupaten Banyuasin memiliki nilai minimum sebesar ,001193 pada tahun 2019 dan kabupaten Banyuasin juga memiliki jumlah hutang maksimum dengan nilai hutang sebesar 0,184080609 pada tahun 2020, nilai mean ,01316257 dan nilai standar deviation sebesar ,013504616.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan sampel yang diteliti terbebas dari gangguan multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas (K. M. Dewi & Pamudji, 2013).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Soewito, 2013).

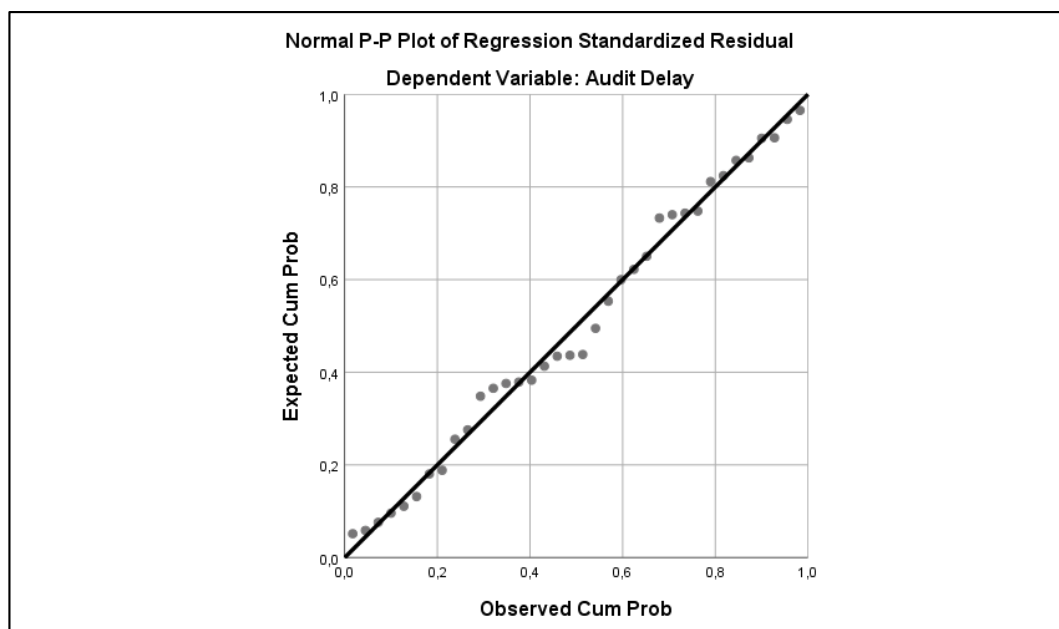
Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
	N	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000

	Std. Deviation	24,90230805
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,094
	Negative	-,082
Test Statistic		,094
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: output spss, 2022

Berdasarkan tabel 3. diperoleh nilai sig = 0,200 = 20% > 5%. Artinya data yang digunakan berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-P Plot sebagai berikut.



Sumber : Output SPSS, 2022

Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot

Pada grafik P-P Plot terlihat data menyebar menjauh di sekitar garis diagonal dan hampir mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ningsih & Dukalang, 2019). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi

adalah dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF) (Meidisa & Susanti, 2019). Apabila nilai tolerance $> 10\%$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Berikut ini merupakan hasil output SPSS untuk uji multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ukuran Pemerintah	,706	1,417
	Tingkat Kemandirian Daerah	,570	1,755
	Temuan Audit	,860	1,162
	Terpilihnya Kembali Kepala Daerah	,744	1,344
Leverage		,823	1,216

a. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4. terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya (Ardian, 2019). Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan uji Glejser (Sembiring, 2020). Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Output SPSS untuk uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,120	13,773		,227	,822
Ukuran Pemerintah	-2,786E-13	,000	-,022	-,109	,914
Tingkat Kemandirian Daerah	162,951	121,335	,302	1,343	,189
Temuan Audit	,731	,594	,226	1,231	,228
Terpilihnya Kembali Kepala Daerah	-3,133	7,730	-,080	-,405	,688

Leverage	-246,606	190,929	-,242	-1,292	,206
----------	----------	---------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 5. dengan jelas menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai $\text{sig} \geq 0,05$. Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Janie, 2012).

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test) (Pasaribu, 2017). Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilihat pada tabel Model Summary di bawah ini.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,460 ^a	,212	,081	26,898	1,982

a. Predictors: (Constant), Leverage, Ukuran Pemerintah, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah, Temuan Audit, Tingkat Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 6. hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1,982 sedangkan nilai du diperoleh sebesar 1,7987 berdasarkan tabel Durbin Watson (DW) dengan $K = 5$ dan $n = 36$ $du = 1,7987$. Apabila kita masukan ke dalam rumus $du < d < 4 - du$ ($1,7987 < 1,982 < 2,2013$). Dapat dikatakan bahwa $H_0 =$ tidak ada autokorelasi, positif atau negatif, yang artinya bahwa dalam model tersebut tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	169,128	26,776		6,316	,000
Ukuran Pemerintah	3,970E-12	,000	,154	,800	,430

Tingkat Kemandirian Daerah	-620,107	235,886	-,564	-2,629	,013
Temuan Audit	-,475	1,154	-,072	-,412	,683
Terpilihnya Kembali Kepala Daerah	20,382	15,028	,255	1,356	,185
Leverage	555,001	371,183	,267	1,495	,145

a. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 7., diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$AD = 169,128 + 3,970 UP - 620,107 TKD - 475 TA + 20,382 TKKD + 555,001 L$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda tersebut sebagai berikut:

- 1) Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah (UP) bernilai positif, artinya bahwa setiap berubahnya ukuran pemerintah maka akan meningkatkan bertambahnya hari *audit delay*.
- 2) Koefisien regresi variabel tingkat kemandirian daerah (TKD) bernilai negatif, artinya bahwa setiap penambahan nilai satu maka tidak akan mempengaruhi bertambahnya hari *audit delay*.
- 3) Koefisien regresi variabel temuan audit (TA) bernilai negatif, artinya bahwa setiap penambahan satu poin temuan maka akan menambah tingkat *audit delay*.
- 4) Koefisien regresi variabel terpilihnya kembali kepala daerah (TKKD) bernilai positif, artinya bahwa setiap penambahan satu periode untuk kepala daerah maka akan mengurangi tingkat *audit delay*.
- 5) Koefisien regresi variabel leverage (L) bernilai positif, artinya bahwa setiap penambahan satu persen leverage maka akan menambah tingkat *audit delay*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,460 ^a	,212	,081	26,898

a. Predictors: (Constant), Leverage, Ukuran Pemerintah, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah, Temuan Audit, Tingkat Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Audit Delay

Sumber : Output SPSS, 2022

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variable independen. Berdasarkan tabel 8. diperoleh nilai Adjusted $R^2 = 0,081 = 8,1\%$. Hal ini berarti variabel independen ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage* secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen *audit delay* sebesar 8,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinearan persamaan regresi (N. Dewi et al., 2018).

Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$ (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen)

$H_1 : \beta \neq 0$ (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen).

Pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau $sig \geq 5\%$.

H_1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig < 5\%$.

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel 9. dibawah ini.

Tabel 9. Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of quares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5839,266	5	1167,853	1,614	,187 ^b
Residual	21704,373	30	723,479		
Total	27543,639	35			

a. Dependent Variable: Audit Delay

b. Predictors: (Constant), Leverage, Ukuran Pemerintah, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah, Temuan Audit, Tingkat Kemandirian Daerah

Sumber : Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 9. diperoleh nilai $F = 1,614$ (dan $sig = 187 > 5\%$) ini berarti variabel independen ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *audit delay*.

Uji Signifikansi Simultan (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individu (Basyit et al., 2020). Berdasarkan tabel 9., maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Variabel ukuran pemerintah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,800 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $0,800 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,430 > 0,05$, sehingga H_1 : ditolak yang artinya ukuran pemerintah secara individu tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
- 2) Variabel tingkat kemandirian daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,629 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $2,629 > 2,042$ dan nilai signifikansi $0,013 > 0,05$, sehingga H_1 : diterima yang artinya tingkat kemandirian daerah secara individu berpengaruh terhadap *audit delay*.
- 3) Variabel temuan audit memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,412 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $0,412 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,683 > 0,05$, sehingga H_1 : ditolak yang artinya temuan audit secara individu tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
- 4) Variabel terpilihnya kembali kepala daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,356 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $1,356 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,185 > 0,05$, sehingga H_1 : ditolak yang artinya terpilihnya kembali kepala daerah secara individu tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.
- 5) Variabel *leverage* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,495 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $1,495 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,145 > 0,05$, sehingga H_1 : ditolak yang artinya *leverage* secara individu tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hubungan Ukuran Pemerintah terhadap *Audit Delay*

Hasil dari pengujian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa ukuran pemerintah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,800 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $0,800 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,430 > 0,05$, sehingga H1: ditolak yang artinya ukuran pemerintah secara individu tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dengan demikian, ukuran pemerintah tidak mempengaruhi *audit delay*. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah yang diukur dengan total aset yang dimiliki maka belum tentu menambah lamanya waktu *audit delay*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rina Rahmawati, Verawaty, 2021) dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Zaenal Wafa, Nugraeni, 2018) yang dilakukan oleh mengenai ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah terhadap *Audit Delay*

Hasil dari pengujian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,629 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $2,629 > 2,042$ dan nilai signifikansi $0,013 > 0,05$, sehingga H1: diterima yang artinya tingkat kemandirian daerah secara individu berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dengan demikian, tingkat kemandirian daerah mempengaruhi *audit delay*. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah berkaitan dengan meningkatnya *audit delay* dalam suatu daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lutfhi Fachrurrozi, 2014) mengenai tingkat kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Hubungan Temuan Audit terhadap *Audit Delay*

Hasil dari pengujian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa temuan audit memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,412 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $0,412 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,683 > 0,05$, sehingga H1: ditolak yang artinya temuan audit secara individu tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dengan demikian, temuan audit tidak mempengaruhi *audit delay*. Hal ini membuktikan bahwa berapa banyaknya jumlah temuan audit dalam suatu daerah Kabupaten/Kota maka belum tentu menambah lamanya waktu *audit delay*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rina Rahmawati, Verawaty, 2021) dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Zaenal Wafa, Nugraeni, 2018) mengenai temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hubungan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah terhadap *Audit Delay*

Hasil dari pengujian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa terpilihnya kembali kepala daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,356 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $1,356 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,185 > 0,05$, sehingga H1: ditolak yang artinya terpilihnya kembali kepala daerah secara individu tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dengan demikian, terpilihnya kembali kepala daerah tidak mempengaruhi *audit delay*. Hal ini membuktikan bahwa walaupun kepala daerah yang sudah menjabat sebanyak dua periode belum tentu menambah atau mengurangi lamanya waktu *audit delay*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abriany Vanesha, Efrizal Syofy, 2020) dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Rina Rahmawati, Verawaty, 2021) yang dilakukan oleh mengenai terpilihnya kembali kepala daerah berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hubungan *Leverage* terhadap *Audit Delay*

Hasil dari pengujian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa *leverage* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,495 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,042, maka $1,495 < 2,042$ dan nilai signifikansi $0,145 > 0,05$, sehingga H1: ditolak yang artinya *leverage* secara individu tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dengan demikian, *leverage* tidak mempengaruhi *audit delay*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi *leverage* maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja pemerintahan sehingga pemerintahan akan lebih cepat untuk menyusun laporan keuangannya karena pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Baldrick Siregar, 2015) dan (Maidelfian Putra Bakar dan Fefri Indra Arza, 2019) mengenai *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hubungan Ukuran Pemerintah, Tingkat Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Terpilihnya Kembali Kepala Daerah dan *Leverage* terhadap *Audit Delay*

Hipotesis keenam adalah ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uji signifikansi simultan yang dilakukan, faktor-faktor ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *audit delay*.

Dalam penelitian ini, disebutkan satu faktor yang terbukti mempengaruhi *audit delay* yaitu tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah dinilai dapat mempengaruhi lamanya tenggang waktu *audit delay* dikarenakan daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah akan cenderung mempunyai kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan daerah dalam melaksanakan pelaporan keuangan secara tepat waktu.

SIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage* terhadap *audit delay* pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 - 2020. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Berdasarkan pengujian koefisien determinasi ganda (R^2) dapat diketahui bahwa ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan audit, terpilihnya kembali kepala daerah dan *leverage* secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen *audit delay*. (2) Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel ukuran pemerintah terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. (3) Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel tingkat kemandirian daerah terbukti berpengaruh terhadap *audit delay*. (4) Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel temuan audit terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. (5) Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel terpilihnya kembali kepala daerah terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. (6) Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel *leverage* terbukti tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. *JEpa*, 4(2), 119–132.
- Basyit, A., Sutikno, B., & Dwiharto, J. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ema*, 5(1), 12–20.
- Dewi, K. M., & Pamudji, S. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu dan Audit Delay Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Dewi, N., Andini, R., & Santoso, E. B. (2018). Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening (Strudi Kasus Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2012-2016). *Journal of Accounting*, 4(4).
- Indonesia, K. K. R. (2014). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013. Retrieved May, 8, 2015.
- Janie, D. N. A. (2012). Statistik deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS. *Jurnal*, April.
- Maharani, I. G. A. (2013). Ketepatanwaktuan Penyampaian Pelaporan Keuangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi pada Perusahaan Perbankan. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 402–415.
- Meidisa, C., & Susanti, F. (2019). Pengaruh Preferensi Dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Nagari Unit Layanan Syariah Cabang Pasar Raya Padang.
- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.34312/jjom.v1i1.1742>
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kota depok). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Pasaribu, A. M. (2017). Pendapatan usaha dan beban operasional terhadap laba bersih pada perusahaan makanan dan minuman. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 7(2), 173–180.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Retnawati, H. (2017). Teknik Pengambilan Sampel. *Disampaikan Pada Workshop Update Penelitian Kuantitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, Dan Isu Plagiarisme*, 1–7.
- Sandag, A. P. (2015). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(8).
- Saragih, M. G., Saragih, L., Purba, J. W. P., & Panjaitan, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar–Dasar Memulai Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Sembiring, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dagang Di Bursa Efek Indonesia. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 3(1), 59–68.
- Septariani, J. (2019). Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2(1), 32–51.
- Sitorus, S., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Berdasarkan PP. NO. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan

- Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Soewito, Y. (2013). Kualitas produk, merek dan desain pengaruhnya terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Verawaty, V. (2021). *Analisis Determinan Audit Delay Of Government Financial Report pada Pemerintah Provinsi di Indonesia*.
- Wibowo, F. H., & Purwaningsih, E. (2019). Pengaruh Nilai APBD, Total Aset, Opini Audit, Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Audit Delay Pemerintah Daerah di Subosukowonosraten. *Media Akuntansi*, 31(01), 11–20.
- Wiryakriyana, A. A. G., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Auditor Switching, dan Sistem Pengendalian Internal Pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(1), 771–798.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).